

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan

2.1.1 Kajian Tentang Partisipasi

2.1.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan konsep kunci dalam kajian sosial yang didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dan sukarela individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan ini tidak hanya mencerminkan kehadiran fisik, tetapi juga kesadaran untuk berkontribusi secara substantif dalam mencapai tujuan bersama. Secara multidimensi, partisipasi dapat dipahami dalam spektrum yang luas: dari sekadar terlibat dalam aktivitas umum hingga mengambil peran krusial dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, partisipasi juga dapat dilihat sebagai proses yang menekankan mekanisme keterlibatan, maupun sebagai hasil yang mengukur dampak nyata dari kontribusi tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Nigel (tahun) dalam jurnalnya,

“Participation’ can refer generally to taking part in an activity, or specifically to taking part in decision-making. It can also refer either to a process or to an outcome.”

Pernyataan ini mempertegas bahwa partisipasi bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan kompleks, tergantung pada konteks, tujuan, serta tingkat pengaruh yang dimiliki oleh partisipan.

Andrea Cornwall, dalam bukunya *Unpacking ‘Participation’: Models, Meanings and Practices* (2008), menjelaskan bahwa partisipasi bukanlah sekadar prosedur formal, tetapi sebuah proses sosial yang kompleks dan dinamis.

Ia menekankan bahwa partisipasi melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga tidak terlepas dari konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan partisipasi yang hanya dianggap sebagai syarat administratif sering mengabaikan dimensi penting berupa negosiasi, potensi konflik, dan upaya kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat. Cornwall menggarisbawahi pentingnya memahami partisipasi sebagai sebuah mekanisme yang mencerminkan realitas sosial dan melibatkan berbagai dinamika yang saling memengaruhi.

Partisipasi anak dan remaja merupakan hak yang tertuang dalam Konvensi Hak – Hak Anak (KHA). Pasal 12 ayat 1 KHA menyatakan bahwa “ Negara - Negara peserta harus menjamin hak anak untuk mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyampaikan pandangan tersebut secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak tersebut diberi bobot yang semestinya sesuai usia dan kematangan anak. Untuk memperluas konsep partisipasi yang diuraikan dalam Pasal 12, Komite PBB untuk Hak Anak dalam Komentar Umum 12 mendefinisikan partisipasi anak sebagai proses yang berkelanjutan, yang mencakup berbagi informasi dan dialog antara anak-anak dan orang dewasa berdasarkan rasa saling menghormati, dan di mana anak-anak dapat belajar bagaimana pandangan mereka dan pandangan orang dewasa diperhitungkan dan membentuk hasil dari proses-proses tersebut. Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas mengakui hak anak untuk menyampaikan pandangan secara bebas dalam segala hal yang memengaruhi dirinya, sebuah prinsip yang kemudian dioperasionalkan melalui berbagai model partisipasi dalam literatur. Meskipun

terdapat sejumlah model seperti Tangga Partisipasi Hart, Derajat Partisipasi Treseder, dan Model Lansdown, Model Partisipasi Lundy dipandang paling selaras dengan definisi partisipasi anak menurut KHA dan pandangan Komite Hak Anak PBB. Hal ini karena Lundy menawarkan kerangka konseptual komprehensif yang memadukan ruang (*space*), suara (*voice*), pendengar (*audience*), dan pengaruh (*influence*), sehingga secara holistik merefleksikan prinsip-partisipasi berbasis hak asasi manusia sebagaimana yang disampaikan CRC. Dalam tata kelola yang ramah anak, model ini memperkuat pentingnya bagian kedua dari Pasal 12 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menggarisbawahi bahwa pandangan anak-anak harus diberi perhatian sesuai dengan bobotnya.

2.1.1.2 Elemen-Elemen Teori Partisipasi Lundy

Teori partisipasi Lundy terdiri dari empat elemen utama yang saling terkait dan harus dipenuhi untuk memastikan partisipasi anak yang efektif. Keempat elemen tersebut adalah:

1) Ruang (*Space*)

Ruang' mengacu pada fakta bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka. Menurut Lundy prasyarat untuk keterlibatan anak-anak dan kaum muda yang bermakna dalam pengambilan keputusan adalah menciptakan kesempatan untuk terlibat, ruang di mana anak-anak didorong untuk mengekspresikan pandangan mereka Anak-anak harus diberikan kesempatan yang aman, inklusif, dan mendukung untuk menyampaikan pandangan mereka. Hal ini melibatkan penciptaan lingkungan yang memungkinkan anak-anak merasa nyaman dan bebas dari tekanan atau intimidasi saat mengungkapkan

pendapat. Ruang partisipasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang rentan atau terpinggirkan, dapat berpartisipasi tanpa hambatan .

2) Suara

Suara berarti bahwa anak-anak harus difasilitasi untuk mengekspresikan pandangan mereka. Pasal 12 memberikan anak hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas. Hak anak untuk mengungkapkan pandangan mereka tidak bergantung pada kapasitas mereka untuk mengungkapkan pandangan yang matang, hak tersebut hanya bergantung pada kemampuan mereka untuk membentuk perspektif tersebut, matang atau tidak anak-anak perlu didukung untuk dapat menyampaikan pendapat mereka secara jelas dan efektif. Dukungan ini dapat berupa pemberian alat, bimbingan, atau metode komunikasi yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Misalnya, penggunaan media visual, cerita, atau permainan dapat membantu anak-anak yang lebih muda atau mereka dengan keterbatasan komunikasi untuk mengungkapkan pandangan mereka.

3) Pendengar

Pendengar mencerminkan kewajiban bahwa pandangan harus didengar , Lundy berusaha menekankan bahwa anak-anak dan kaum muda memiliki 'hak untuk didengar', mereka harus dijamin kesempatan untuk mengomunikasikan pandangan mereka kepada individu atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan.pendapat atau pandangan yang disampaikan oleh anak-anak harus didengarkan oleh pihak-pihak yang berwenang atau pengambil keputusan. Hal ini menuntut kesediaan dan kesiapan orang dewasa, termasuk pekerja sosial,

guru, atau pembuat kebijakan, untuk menerima dan mempertimbangkan pandangan anak-anak secara serius. Proses mendengarkan ini harus dilakukan dengan sikap terbuka dan menghargai.

4) Pengaruh (*Influence*)

Mempengaruhi berarti bahwa pandangan-pandangan ini harus ditindaklanjuti, sebagaimana mestinya bahkan jika beberapa bentuk ruang diciptakan untuk memfasilitasi penyertaan pandangan anak-anak, dan terlepas dari upaya untuk mendefinisikan ulang pentingnya penyertaan ini, penting bahwa setiap perspektif yang ditawarkan dari anak-anak dapat memengaruhi negosiasi yang lebih luas. Pandangan anak-anak harus memiliki dampak nyata terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi anak tidak boleh bersifat simbolis, melainkan harus menghasilkan perubahan atau keputusan yang mencerminkan suara dan kepentingan mereka. Misalnya, dalam konteks pekerjaan sosial, masukan dari anak-anak harus diintegrasikan ke dalam rencana intervensi atau kebijakan yang dirancang untuk mereka .

Secara umum, tantangan utama saat menerapkan hak anak untuk berpartisipasi adalah menemukan cara untuk memastikan bahwa orang dewasa tidak hanya mendengarkan anak-anak dan orang muda; bahwa mereka menganggap serius pandangan anak-anak dan terbuka untuk dipengaruhi oleh pandangan tersebut. Yang penting, meskipun komponen-komponen ini sering disajikan secara berurutan, komponen-komponen tersebut saling terkait. Artinya, upaya yang diarahkan untuk mewujudkan satu komponen berdampak pada dan tentu saja bergantung pada komponen lainnya. Dengan cara ini, kerangka kerja Lundy telah

memberikan model yang menjelaskan bahwa agar Pasal 12 dapat direalisasikan, elemen-elemen yang berbeda tetapi saling memperkuat harus ada.

Partisipasi anak tidak bisa didefinisikan semata-mata dalam konteks anak memiliki suara; dengan demikian, keikutsertaan dalam kehidupan sosial juga memerlukan adanya ruang yang bermakna, kehadiran audiens untuk mendengarkan apa yang anak katakan, dan mekanisme untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

2.1.1.3 Prinsip Dasar Partisipasi

Cornwall (2008) mengidentifikasi beberapa prinsip dasar dalam partisipasi yang bermakna:

1) Partisipasi sebagai Proses Sosial

Partisipasi bukanlah kegiatan yang statis atau sekali jadi, melainkan proses yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Partisipasi melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi, serta dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang ada.

2) Kontekstualisasi Partisipasi

Partisipasi harus disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan. Cornwall menekankan bahwa tidak ada model partisipasi yang "satu ukuran untuk semua" (*one-size-fits-all*), karena setiap komunitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik.

3) Inklusivitas dan Representasi

Partisipasi harus melibatkan semua kelompok, termasuk mereka yang terpinggirkan atau rentan. Cornwall menekankan pentingnya memastikan bahwa

suara kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan remaja didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

4) Dinamika Kekuasaan

Partisipasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan. Cornwall mengkritik pendekatan partisipasi yang mengabaikan ketimpangan kekuasaan antara peserta dan fasilitator, atau antara kelompok dominan dan terpinggirkan. Partisipasi yang bermakna harus mampu mengatasi ketimpangan ini dan menciptakan ruang yang setara bagi semua pihak.

5) Partisipasi sebagai Alat Pemberdayaan

Partisipasi seharusnya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan peserta. Cornwall menekankan bahwa partisipasi harus menghasilkan perubahan nyata, baik dalam bentuk kebijakan, program, atau praktik yang lebih adil dan inklusif.

2.1.1.4 Relevansi Partisipasi dalam Pekerjaan Sosial

Partisipasi memiliki relevansi yang kuat dalam bidang pekerjaan sosial, terutama dalam upaya mempromosikan hak-hak anak dan memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pekerja sosial seringkali berinteraksi dengan anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti korban kekerasan, anak jalanan, atau anak dengan disabilitas.

Lundy memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa suara anak-anak didengar dan dipertimbangkan dalam intervensi pekerjaan sosial.

1) Pemberdayaan Anak

Lundy menekankan pentingnya pemberdayaan anak melalui partisipasi yang bermakna. Dalam pekerjaan sosial, hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan anak-anak dalam proses assessment, perencanaan intervensi, dan evaluasi program. Misalnya, dalam kasus anak korban kekerasan, pekerja sosial dapat melibatkan anak dalam menentukan jenis dukungan atau layanan yang mereka butuhkan.

2) Pendekatan Berpusat pada Anak

Partisipasi mendukung pendekatan berpusat pada anak (*child-centered approach*) dalam praktik pekerjaan sosial. Dengan memastikan bahwa anak-anak memiliki ruang, suara, pendengar, dan pengaruh, pekerja sosial dapat merancang intervensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi anak.

3) Advokasi untuk Hak-Hak Anak

Partisipasi juga relevan dalam konteks advokasi untuk hak-hak anak. Pekerja sosial dapat menggunakan model ini untuk memastikan bahwa hak partisipasi anak diakui dan diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik sosial. Misalnya, dalam advokasi untuk reformasi sistem perlindungan anak, pekerja sosial dapat memastikan bahwa suara anak-anak menjadi bagian integral dari proses advokasi.

4) Peningkatan Kualitas Layanan

Dengan melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan, pekerja sosial dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Partisipasi anak

memungkinkan pekerja sosial untuk memahami perspektif anak secara langsung, sehingga intervensi yang dirancang lebih tepat sasaran dan efektif .

2.1.2 Kajian Tentang Remaja

2.1.2.1 Pengertian

Remaja merupakan fase perkembangan yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Menurut World Health Organization (2021), remaja didefinisikan sebagai kelompok usia 10-19 tahun. Fase ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Remaja sering disebut sebagai masa pubertas, di mana terjadi pematangan organ reproduksi dan perkembangan identitas diri .

2.1.2.2 Karakteristik Remaja

1) Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik remaja meliputi pertumbuhan tubuh yang cepat (growth spurt), perubahan suara, perkembangan organ seksual, dan peningkatan massa otot. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Perkembangan fisik remaja seringkali memengaruhi kepercayaan diri dan citra tubuh mereka (Santrock, 2018).

2) Perkembangan Kognitif

Menurut Jean Piaget, remaja memasuki tahap operasional formal, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak, memecahkan masalah kompleks, dan merencanakan masa depan. Namun, perkembangan kognitif ini juga membuat remaja cenderung mengambil risiko karena mereka belum sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka (Piaget, 1972).

3) Perkembangan Emosional dan Psikologis

Remaja mengalami perubahan emosional yang signifikan, termasuk peningkatan intensitas emosi, keinginan untuk mandiri, dan pencarian identitas diri. Erik Erikson, dalam teori perkembangan psikososial, menyebut fase ini sebagai "Identity vs. Role Confusion," di mana remaja berusaha menemukan jati diri mereka sambil menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan (Erikson, 1968).

4) Perkembangan Sosial

Remaja mulai membentuk hubungan sosial yang lebih kompleks, termasuk persahabatan yang lebih intim dan hubungan romantis. Mereka juga mulai mencari penerimaan dari kelompok sebaya (peer group) dan mengembangkan keterampilan sosial. Namun, tekanan dari teman sebaya (peer pressure) dapat memengaruhi perilaku dan keputusan remaja, termasuk dalam hal penggunaan narkoba, merokok, atau perilaku berisiko lainnya (Steinberg, 2014).

2.1.3 Kajian Tentang Bencana

2.1.3.1 Pengertian Bencana

Menurut *International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR-2002,24) dalam Nurjanah dkk. (2013:10) menyebutkan bahwa bencana adalah

“Suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya”.

Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR dalam Nurjanah dkk. (2013:11) sebagaimana disebutkan diatas, dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut:

- 1) Adanya peristiwa;
- 2) Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
- 3) Terjadi kaerena tiba-tiba (*sudden*) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap (*slow*);
- 4) Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian social-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain;
- 5) Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Pengertian bencana menurut Joyner & McClain (2021) dalam Social work Speaks menyebutkan bahwa,

“an extraordinary event, either natural or human-made, concentrated in time and space, that often results in damage to property and harm to human life or health and that is disruptive of the ability of some social institutions to continue fulfilling their essential functions. (Barker, 2014, p. 120)”

Peristiwa atau rangkaian peristiwa sebagaimana didefinisikan oleh NASW tersebut dapat dijelaskan bahwa peristiwa bisa bersifat luar biasa atau bisa berupa lebih dari satu peristiwa (rangkaian peristiwa/fenomena alam) dalam waktu dan ruang yang terkonsentrasi serta menimbulkan dampak berbahaya untuk nyawa manusia serta mengganggu kemampuan Lembaga sosial untuk menjalankan fungsinya Contohnya peristiwa adalah gempa tektonik. Apabila gempa tersebut diikuti bencana tsunami, maka hal ini disebut rangkaian peristiwa.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2) Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2012), jenis-jenis bencana antara lain:

1) Gempa Bumi

Merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi.

2) Tsunami

Diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor. Kecepatan tsunami yang naik ke daratan (run-up) berkurang menjadi sekitar 25-100 Km/jam dan ketinggian air.

3) Letusan Gunung Berapi

Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi apapun jenis produk tersebut kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan.

4) Tanah Longsor

Merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng.

5) Banjir

Dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.

6) Angin Topan

Adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem

cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam.

7) Gelombang Pasang

Adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan, maupun di darat terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 Km/jam. Gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada suatu wilayah yang dapat menenggelamkan kapalkapal tersebut. Jika terjadi gelombang pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi.

8) Kebakaran

Adalah situasi dimana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api serta hasilnya menimbulkan kerugian. Sedangkan lahan dan hutan adalah keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan serta hasilhasilnya dan menimbulkan kerugian.

9) Aksi Teror atau Sabotase

Adalah semua tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan mengancam atau membahayakan jiwa seseorang atau banyak orang oleh seseorang atau golongan tertentu yang tidak bertanggung jawab. Aksi teror atau sabotase biasanya dilakukan dengan berbagai alasan dan

berbagai jenis tindakan seperti pemboman suatu bangunan/tempat tertentu, penyerbuan tiba-tiba suatu wilayah,tempat, dan sebagainya. Aksi teror atau sabotase sangat sulit dideteksi atau diselidiki oleh pihak berwenang karena direncanakan seseorang atau golongan secara diam-diam dan rahasia.

10) Kerusuhan atau Konflik Sosial

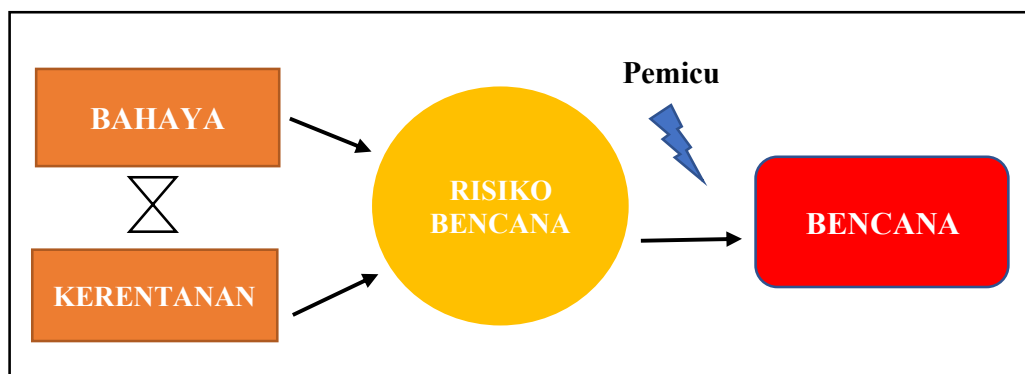
Adalah kondisi dimana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

11) Epidemii, Wabah, dan Kejadian Luar Biasa

Merupakan ancaman yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu. Pada skala besar, epidemi atau wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit dan korban jiwa. Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia dan sampai sekarang masih harus terus diwaspadai antara lain demam berdarah, malaria, flu burung, anthraks, busung lapar dan HIV/AIDS. Wabah penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi penyebarannya, sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup masyarakat yang salah merupakan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya bencana ini.

2.1.3.3 Proses Terjadinya Bencana

Menurut Nurjanah dkk (2013:13-14) peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, baru dapat disebut bencana ketika masyarakat/manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulangnya. Ancaman alam itu sendiri tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapinya dan pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia dalam bertindak. Berikut merupakan diagram proses terjadinya bencana.



Gambar 2. 1 Proses Terjadinya Bencana

Sumber: Nurjanah dkk. (2013) *Manajemen Bencana*

Melalui proses tersebut, diketahui bahwa bencana terjadi selama melalui proses dan memenuhi unsur-unsur atau kriteria. Adapun unsur-unsur yang dapat menimbulkan bencana yaitu sebagai berikut.

1) Bahaya (*Hazard*)

Menurut Fema dalam Coppola (2015) mendefinisikan bahaya atau *Hazard* sebagai :

“Hazards are events or physical conditions that have the potential to cause fatalities, injuries, property damage, infrastructure damage, agricultural loss, damage to the environment, interruption of business, or other types of harms or losses (FEMA, 1997). What determines whether a hazard becomes a disaster are risk and vulnerability.”

Bahaya (*hazard*) banyak sekali jenisnya seperti api, air, angin, juga bumi dimana kita berada di atasnya. Bahaya dapat dipengaruhi oleh faktor (1) Alam, seperti gempa bumi, tsunami, angin kencang, topan, gunung Meletus. (2) Manusia, seperti konflik, perang, kebakaran pemukiman, wabah penyakit, kegagalan teknologi, pencemaran, terorisme. (3) Alam dan Manusia, seperti banjir, tanah longsor, kelaparan, kebakaran hutan dan kekeringan (Pusponegoro & Sujudi, 2016).

2) Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Pakar bencana Inggris Fordham dalam (Alston Margaret dkk., 2019) mengemukakan bahwa :

“Vulnerability is embedded in complex social relations and processes and is situated squarely at the human-environment intersection requiring social solutions if successful risk reduction is to occur.”

Kerentanan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk tempat seseorang di dunia – gender, pendidikan, pekerjaan, akses ke sumber daya, struktur keluarga, seksualitas, misalnya – dan dibentuk oleh keadaan.

Le De, Gaillard and Friesen (2015: 359) menulis bahwa :

“Individuals and communities are vulnerable economically because they are poor, such as having little savings or access to bank credit. They are vulnerable geographically because they live in risky locations (for example as a result of limited land access or information on potential hazards), socially because they do not have a social security system, insurance or strong social networks, and politically, since their voice is overlooked by political institutions.”

Asosiasi Internasional untuk partisipasi publik mendefinisikan ‘orang yang rentan’ sebagai ‘siapa pun yang mungkin merasa sulit menerima, memahami, atau bertindak berdasarkan informasi sebelum, selama, atau setelah keadaan darurat’ (IAPPA 2014: 8). Dengan demikian, akan ada orang yang tidak menerima, memahami, atau bertindak berdasarkan informasi karena sejumlah alasan misalnya, karena kesulitan bahasa, masalah mobilitas, atau bahkan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengakses situs informasi.

Mereka mungkin dibatasi oleh posisi mereka sebelumnya dalam struktur kekuasaan masyarakat. Mereka mungkin tua atau sangat muda, mereka mungkin ibu dari anak-anak kecil, mereka mungkin orang-orang yang telah menyewa di daerah tersebut yang karenanya tidak memiliki akses langsung ke dukungan keuangan dan dukungan lainnya yang sama seperti mereka yang kehilangan rumah. Mereka mungkin, pada kenyataannya, wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut ketika bencana terjadi. Mereka mungkin pekerja pertanian yang tidak berdokumen yang tidak tercatat dalam catatan resmi. Mereka mungkin orang-orang yang berisiko mengalami kekerasan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang tidak ingin ditemukan atau tercantum dalam daftar apa pun – misalnya, para ayah yang bersembunyi untuk menghindari keharusan membayar tunjangan anak.

Menurut Copola (2015) mendefinisikan bahwa :

“Vulnerability is a measure of the propensity of an object, area, individual, group, community, country, or other entity to incur the consequences of a hazard. This measurement results from a combination of physical, social, economic, and environmental factors or processes. Vulnerability can be decreased through actions that lower the propensity to incur harm, or it can be increased through actions that increase that propensity. For instance, retrofitting a building to withstand the shaking effects of an earthquake will lower that building’s vulnerability to the hazard, lowering risk.”

Vulnerability adalah tingkat kecenderungan suatu objek, individu, kelompok, komunitas, atau entitas lainnya untuk mengalami dampak negatif dari suatu bahaya (*hazard*). Tingkat kerentanan ini ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan dapat dikurangi melalui tindakan yang menurunkan kemungkinan terkena dampak buruk, seperti meningkatkan ketahanan infrastruktur atau memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, kerentanan dapat meningkat jika tindakan yang diambil memperbesar risiko terhadap bahaya tertentu. Sebagai contoh, memperkuat struktur bangunan agar tahan terhadap gempa akan mengurangi tingkat kerentanannya terhadap bahaya gempa, sehingga mengurangi risiko secara keseluruhan.

Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi. Kerentanan fisik menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap factor bahaya (*hazard*) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator: (1) persentase kawasan terbangun; (2) kepadatan bangunan; (3) persentase bangunan konstruksi darrat; (4) rasio Panjang jalan; (5) jaringan indicator; (6) jaringan PDAM; (7) jalan kereta api.

3) Risiko Bencana (*Disaster Risk*)

Risiko (*risk*) harus diartikan sebagai kemungkinan (*probabilty*) terjadinya bencana dan korban masal yang berkaitan dengan berbagai fenomena yang merupakan hazard seperti gempa, tsunami, banjir, ataupun konflik (Posponegoro & Sujudi, 2016).

Menurut Copola (2015) *Risk is the likelihood of an event occurring multiplied by the consequence of that event, were it to occur*. Copola menjelaskan bahwa risiko merupakan hasil perkalian antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa (*likelihood*) dengan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkannya jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi (*consequence*). Konsep ini menekankan bahwa risiko tidak hanya bergantung pada seberapa sering suatu kejadian dapat terjadi, tetapi juga pada tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya. Jika suatu kejadian memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi dan dampaknya besar, maka risiko yang dihadapi juga tinggi. Sebaliknya, jika kemungkinan terjadinya rendah atau dampaknya kecil, maka risikonya lebih rendah. Pemahaman ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti manajemen risiko, keselamatan kerja, kebencanaan, dan keuangan, untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengurangi potensi bahaya yang dapat merugikan individu, organisasi, atau lingkungan. Dengan mengukur dan menganalisis risiko, langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya peristiwa atau meminimalkan dampaknya, sehingga risiko keseluruhan dapat dikendalikan.

Tingkat resiko bencana disuatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana

(PRB) atau *Disaster Risk Reduction* (DRR), ketiga faktor tersebut yang menjadi dasar acuan untuk dikaji guna menentukan langkah-langkah dalam pengelolaan bencana.

$$\text{RISIKO BENCANA (RB)} = \frac{\text{Bahaya (H) x Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$$

Dalam kaitan ini, bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana baik alam maupun buatan di suatu empat. Kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman. Ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan untuk mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Dengan demikian semakin tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan, akan semakin besar pula risiko bencana yang dihadapi.

4) Kapasitas (*Capacity*)

Kapasitas merupakan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana pada semua tahapannya, melalui berbagai sistem yang dikembangkan (tradisi budaya, gotong royong, kesiapan darurat, kemampuan bangkit kembali, kemampuan membangun yang siap menghadapi ancaman bencana). Kemampuan ini dapat berupa pencegahan, mengurangi dampak, kesiapsiagaan dan keterampilan mempertahankan hidup dalam situasi darurat.

Posponegoro dan Sujudi (2016), mengkategorikan kapasitas ke dalam:

- 1) Fisik atau materi, yang berarti bahwa manusia dengan sumber daya ekonomi dan materi yang memadai dapat bertahan lebih baik.
- 2) Sosial atau organisasi yang membantu mereka untuk dapat menghadapi, tahan dan mampu menangani ancaman yang mungkin ada.

- 3) Tingkah laku atau motivasi, yaitu anggota masyarakat yang peduli dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri dan tingkat kepercayaan untuk menghadapi tantangan bencana alam.

Kapasitas ditentukan berdasarkan kesiapan dalam mitigasi dan melakukan langkah tanggap darurat untuk menangani potensi dan kejadian bencana. Kapasitas juga dapat diukur dari tingkat kesiapan dengan beberapa parameter antara lain pengetahuan, kelembagaan, mekanisme kerja dan sumber dayanya. Jika di suatu daerah belum mempunyai unsur parameter tersebut sama sekali, maka kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dikatakan masih rendah (Pusat Krisis Kesehatan, 2016).

2.1.3.4 Manajemen Penanggulangan Bencana

Menurut Holdeman & Keessboersmaa, n.d., Manajemen bencana merupakan usaha praktis, yang bergantung pada keterampilan manajerial multidisiplin dan kemampuan koordinasi praktis yang terlatih dengan baik. Menurut Alexander dalam Coppola (2015) *Comprehensive disaster management is based upon four distinct components: mitigation, preparedness, response, and recovery.*

Meskipun berbagai terminologi sering digunakan untuk menjelaskannya, manajemen bencana yang efektif memanfaatkan setiap komponen dengan cara berikut:

- 1) Kesiapsiagaan bencana menurut Alston (2019) merupakan sebuah proses yang kini semakin lazim dilakukan dalam upaya mempersiapkan komunitas menghadapi potensi ancaman bencana. Proses ini mencakup berbagai tingkatan

praktik, mulai dari kerja langsung dengan komunitas secara luas untuk menghadapi kemungkinan bencana, hingga interaksi dengan kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas guna mengatasi risiko lingkungan yang sudah diketahui. Selain itu, kesiapsiagaan juga melibatkan pendampingan individu dalam menyusun rencana pribadi menghadapi bencana. Secara keseluruhan, upaya membangun ketahanan terhadap bencana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan individu, komunitas, serta para pekerja di bidang kebencanaan dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi.

- 2) Respons adalah kegiatan yang melibatkan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana yang telah terjadi atau sedang terjadi, guna mencegah penderitaan lebih lanjut, kerugian finansial, atau kombinasi keduanya
- 3) Pemulihan adalah istilah yang umum digunakan dalam manajemen bencana internasional, merupakan salah satu komponen respons. Pemulihan melibatkan pengembalian kehidupan korban ke keadaan normal setelah dampak konsekuensi bencana. Fase pemulihan umumnya dimulai setelah respons langsung berakhir, dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelahnya.
- 4) Mitigasi disebut juga Pengurangan Risiko Bencana (PRB), mitigasi melibatkan pengurangan atau penghapusan kemungkinan atau konsekuensi dari suatu bahaya, atau keduanya. Mitigasi berusaha untuk "mengatasi" bahaya sehingga dampaknya terhadap masyarakat berkurang.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui Pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

(1) Pendekatan Teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

- (1)) Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa
- (2)) Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api.
- (3)) Membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

(2) Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

(3) Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di tahap mitigasi sebagai contoh:

- (1))Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana,
- (2))Sistem perijinan dengan memasukkan aspek Analisa risiko bencana

2.1.3.5 Faktor Penyebab Bencana

Secara garis besar, terjadinya bencana dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Posponegoro & Sujudi, 2016):

1) Alam

Bencana alam murni penyebab utamanya adalah alam itu sendiri. Bencana yang disebabkan oleh proses alam ini adalah bencana akibat proses geologis, proses geomorfologis dan proses klimatologis, yang mengakibatkan bencana.

Bencana alam masih dibagi lagi menjadi dua faktor penyebab, yakni:

2.2 *Hazards of exogenic origin* (bencana alam asal luar)

Dari bencana alam-bencana alam tersebut di atas, yang termasuk di dalam bencana asal luar (*hazards of exogenic origin*) adalah banjir, erosi, gerakan tanah, dan kekeringan.

2.3 *Hazards of endogenic origin* (bencana alam asal dalam)

Sedangkan yang termasuk dalam bencana asal dalam (*hazards of endogenic origin*) adalah gempa bumi, gelombang pasang (tsunami), dan Letusan gunung api (hujan abu, aliran lahar).

2) Perbuatan Manusia (*man made disaster*)

Bencana yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Adapun bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (*hazards of anthropogenic origin*) adalah:

- (1) Degradasi lingkungan
- (2) Penggundulan hutan yang berakibat pada bencana kekeringan, erosi/banjir
- (3) Gempa bumi akibat pembangunan
- (4) Penurunan tanah/lahan (amblesan), longsor, dan akibat ulah manusia (dalam rangka pengembangan wilayah yang tidak berwawasan lingkungan)

2.1.3.6 Pengaruh Bencana Terhadap Masyarakat

Bencana mengganggu masyarakat dalam banyak cara dan sebagian besar orang tebiasa dengan statistic bencana yang berhubungan dengan jumlah orang yang tewas dan terluka, bangunan rusak dan hancur, serta nilai property yang hilang (Quarantelli, 2001b). Banyak ilmuan (Cappola, 2007; Drabek & Hoetmer. 1991; Helsloot & Ruitenberg 2004; *Indian Institute of Disaster Management*, 2007; Solway, 2004) mengidentifikasi konsekuensi bencana yang mengganggu masyarakat dan mengurangi kualitas hidup individu dalam masyarakat. Berikut adalah rangkuma konsekuensi tersebut.

- 1) Kurangnya kemampuan untuk bergerak atau melakukan perjalanan karena infrastruktur transportasi yang rusak dan hancur
- 2) Terganggunya kesempatan Pendidikan karena kerusakan sekolah atau guru dan siswa yang cedera atau cacat karena adanya tekanan seperti trauma
- 3) Hilangnya warisan budaya, fasilitas keagamaan, dan sumber daya masyarakat

- 4) Hilangnya pasar dan kesempatan berdagang yang disebabkan oleh gangguan bisnis jangka pendek akibat hilangnya konsumen, pekerja, fasilitas, persediaan atau peralatan
- 5) Hilangnya kepercayaan investor yang mungkin berpotensi menarik kembali investasi (penanaman modal) mereka dan ini di kemudian hari akan menciptakan pengangguran karena pemotongan kerja atau kerusakan di tempat kerja
- 6) Sulitnya komunikasi karena kerusakan atau kehilangan infrastruktur
- 7) Adanya tunawisma yang disebabkan oleh hilangnya rumah dan harta benda
- 8) Kelaparan karena terputusnya rantai suplai makanan yang menyebabkan kurangnya suplai makanan dan meningkatnya harga
- 9) Kehilangan, kerusakan, dan pencemaran lingkungan akibat kerusakan bangunan dan infrastruktur yang rusak dan belum diperbaiki, serta deformasi dan hilangnya kualitas tanah
- 10) Kerusakan public ketika respon pemerintah tidak memadai.

2.1.4 Tinjauan Bencana Gempa Bumi

2.1.4.1 Pengertian Bencana Gempa Bumi

Menurut Nurjanah dkk (2013), gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran atau pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba. Penyebab gempa bumi yang selama ini disepakati antara lain dari proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, pergerakan geomorfologi secara lokal.

Menurut Anies (2018), gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam perut bumi secara tiba-tiba, sehingga menciptakan gelombang seismik, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi.

Menurut Noor (2005), gempa bumi adalah getaran bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energy yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Besarnya gelombang yang beragam mulai dari yang sangat kecil sehingga sulit dirasakan hingga guncangan yang dahsyat, sehingga mampu meruntuhkan bangunan yang kokoh.

Menurut Bakornas PB, (2007), gempa bumi merupakan salah satu dari berbagai macam bencana alam yang ada di Indonesia yang bilamana penanganan maupun mitigasi yang dilakukan tidak baik akan menimbulkan ancaman korban jiwa maupun korban materi. Berbagai komponen yang terancam apabila terjadi gempabumi diantaranya:

- 1) Perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni.
- 2) Bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok tanpa perkuatan.
- 3) Bangunan dengan atap yang berat.
- 4) Bangunan tua dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah.
- 5) Bangunan tinggi yang dibangun diatas tanah lepas/tidak kompak.
- 6) Bangunan diatas lereng yang lemah/tidak stabil.
- 7) Infrastruktur diatas tanah atau timbunan.

2.1.4.2 Parameter Terjadinya Gempa Bumi

Parameter terjadinya gempa bumi antara lain (Idawati, 2005):

1) Waktu terjadinya gempa bumi

Waktu terjadinya gempa bumi menunjukkan waktu terlepasnya akumulasi energy dari sumber gempa bumi.

2) Episentrum (Epicenter)

Epicenter merupakan titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari kedalaman sumber gempa bumi (hiposentrum). Posisi episentrum dibuat dalam system koordinat bola bumi atau system koordinat geografis dan dinyatakan dalam derajat lintang dan bujur.

3) Kedalaman sumber gempa

Kedalaman sumber gempa bumi merupakan jarak yang dihitung tegak lurus dari permukaan bumi. Kedalaman gempa dibagi menjadi tiga zona yaitu dangkal, menengah, dan dalam.

4) Magnitudo gempa

Magnitudo gempa merupakan kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya energi yang terlepas pada saat gempa bumi terjadi dan merupakan hasil pengamatan seismograf. Satuan yang umum digunakan di Indonesia adalah skala Richter (*Richter Scale*), yang bersifat logaritmik. Umumnya magnitudo diukur berdasarkan amplitude dan periode fase gelombang tertentu.

Tabel 2. 1 Perbandingan Skala Richer dan Skala MMI

| Skala Richer | Skala (MMI) | Keterangan |
|--------------|-------------|---|
| < 3,4 | I | Sangat jarang/hampir tidak ada orang yang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf. |
| 3,5 | II | Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di Gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan. |
| 4,2 | III | Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di Gedung tinggi. Mobil yang parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat. |
| 4,3 - 4,8 | IV | Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, di luar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang. |
| 4,9 - 5,4 | V | Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang-barang diatas meja akan terjatuh, plesteran tembok rusak, barang-barang yang tidak stabil akan roboh, pendulum jam dinding aan berhenti. |
| 5,5 | VI | Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan, banyak perabotan yang berat bergeser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak. |
| 6,1 | VII | Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada setiap bangunan yang desain konstruksinya buruk, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti. |
| 6,2 | VIII | Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang buruk, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik.. |
| 6,9 | IX | Kerusakan berarti pada bangunan dengan desain konstruksi yang baik, pipa-pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah. |
| 7,0 - 7,9 | X | Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, jembatan putus, rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser. |
| >8 | XI | Kerusakan total, Gerakan gempa terlihat bergelombang di atas tanah, benda-benda berterbangan ke udara. |

Sumber: Triton PB 2009

2.1.4.3 Sifat Gempa Bumi

Adapun sifat dari gempa bumi menurut Anies (2018), sebagai berikut:

- 1) Secara geografis, distribusinya terstruktur terdapat daerah gempa bumi atau dengan gempa bumi yang besar
- 2) Melepaskan energi yang sangat besar Pelepasan energi bisa terjadi di benua (daratan) maupun di lautan, pelepasan energi di lautan menyebabkan tsunami.
- 3) Datang secara berkelompok baik terhadap waktu maupun ruang
- 4) Kedalam fokus (titik api) gempa bervariasi sampai 700 km
- 5) Distribusi frekuensi gempa merupakan fungsi dari kedalaman fokus namun tidak seragam terhadap kedalaman maupun geologis

2.1.4.4 Penyebab Gempa Bumi

Menurut Anies (2018) penyebab dari gempa bumi yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktivitas gunung berapi yang meningkat
- 2) Pelepasan energi karena konsentrasi tegangan tinggi pada kerak bumi.
- 3) Pergerakan terus menerus dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal (peka terhadap panas) di bawah gunung berapi.
- 4) Aktivitas magma pada gunung berapi dapat menimbulkan gempa.
- 5) Pergeseran lempeng tektonik, sehingga biasa disebut gempa tektonik.

2.1.4.5 Dampak Gempa Bumi

Bencana Gempa bumi dapat mengakibatkan trauma psikis atau mental. Ternyata bencana gempa bumi tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau bangunan, harta benda, dan jiwa manusia, tetapi juga kondisi kejiwaan bagi para

korban. Akibat bencana tersebut, sebagian besar korban dapat mengalami penderitaan gangguan psikologis berupa trauma (Anies, 2018)

2.1.4.6 Akibat Gempa Bumi

Menurut Anies (2018) dan Kusumasari (2014), beberapa akibat dari gempa bumi adalah sebagai berikut:

- 1) Guncangan dan retakan tanah: hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
- 2) Longsor: dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya, serta dapat menyebabkan sungai tersumbat.
- 3) Tsunami: menimbulkan gelombang tinggi di pantai.
- 4) Banjir: dapat disebabkan karena sungai tersumbat longsor atau jebolnya dam, tanggul atau waduk.
- 5) Kebakaran: guncangan gempa dapat menyebabkan kerusakan listrik dan/atau kebocoran gas dan tumpahan kompor minyak.
- 6) Gunung meletus: gempa di atas 9 SR dapat memicu gunung meletus, terutama bila pusat gempa terjadi dekat suatu gunung berapi.

2.1.5 Tinjauan Tentang Pratik Pekerjaan Sosial

2.1.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berperan dalam membantu individu, kelompok, dan komunitas dalam menghadapi perubahan sosial serta membangun kondisi yang mendukung tercapainya kesejahteraan bersama.

Karla dalam bukunya *Generalist social worker* (2017) menuliskan

“Social work is a profession that supports individuals, groups, and communities in a changing society and creates social conditions favorable to the well-being of people and society. Social workers strive to create order and enhance opportunities for people in an increasingly complex world. The social work profession charges its members with the responsibility of promoting competent human functioning and fashioning a responsive and just society. To achieve these goals, social workers require a clear understanding of the way things are and a positive view of the way things could be. Social work practitioners fine-tune their vision by incorporating professional perspectives on human behavior, cultural diversity, social environments, and approaches to change.”

International Federation of Social Workers (2014) Mendefinisikan pekerjaan

sosial sebagai berikut :

“a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.”

Council on Social Work Education (CSWE) (2015) yang mengakreditasi program-program sarjana dan pascasarjana pekerjaan sosial, menggambarkan fokus ganda dari profesi pekerjaan sosial sebagai

“ as promoting the well-being of individuals and the collective betterment of society through the “quest for social and economic justice, the prevention of conditions that limit human rights, the elimination of poverty, and the enhancement of the quality of life for all persons, locally and globally”
antara lain:

2.1.5.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan dari pekerjaan sosial berakar pada pemahaman mendalam tentang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka membutuhkan kehadiran dan dukungan orang lain. Proses tumbuh dan berkembang setiap individu sangat bergantung pada peran orang lain dalam hal

pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan. Identitas diri seseorang bahkan kelangsungan hidupnya, baik secara fisik maupun mental sangat dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan individu lain. Hubungan antar manusia yang saling terikat dan bergantung satu sama lain inilah yang menjadi dasar komitmen pekerja sosial untuk memperkuat kualitas interaksi sosial. Dengan kata lain, pekerjaan sosial bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan sosial klien sekaligus memperbaiki kondisi sosial yang memengaruhi kemampuan tersebut.

1) Peningkatan Fungsi Sosial

Konsep fungsi sosial merupakan kunci utama dalam memahami fokus unik dari pekerjaan sosial serta membedakannya dari profesi pertolongan lainnya. Fungsi sosial mengacu pada kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan peran-peran sosial penting dalam masyarakat. Menurut Maslow (1970) dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia, kebutuhan paling dasar mencakup makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, serta rasa aman. Di tingkat yang lebih tinggi, manusia membutuhkan rasa memiliki dalam jaringan sosialnya, pengakuan dari orang lain, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri (aktualisasi diri). Salah satu keunikan dalam profesi pekerjaan sosial adalah bahwa para pekerja sosial dibekali untuk membantu klien dalam meningkatkan fungsi sosial mereka di semua tingkatan kebutuhan tersebut.

Keberagaman situasi manusia yang ditangani pekerja sosial tercermin dari fakta bahwa klien sering kali harus menjalankan berbagai peran sosial secara bersamaan, seperti menjadi anggota keluarga, orang tua, pasangan, pelajar, pasien,

pekerja, tetangga, hingga warga negara. Faktor seperti jenis kelamin, etnis, budaya, agama, kemampuan, dan pekerjaan dapat memengaruhi sejauh mana peran-peran ini ditentukan atau fleksibel. Selain itu, peran-peran ini juga bisa berubah seiring waktu, yang dapat menimbulkan kebingungan, tekanan, dan konflik di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Oleh karena itu, meningkatkan fungsi sosial berarti membantu klien untuk menyesuaikan kapasitas pribadinya dengan tuntutan berbagai peran sosial serta menavigasi harapan, sumber daya, dan peluang yang ada di lingkungan sosial-ekonominya, termasuk konflik yang mungkin timbul.

Meskipun pekerjaan sosial mencakup seluruh masyarakat, fokus utamanya tetap pada kelompok yang paling rentan dan mereka yang mengalami ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan penindasan. Kelompok rentan ini meliputi anak-anak, lansia yang lemah, individu yang hidup dalam kemiskinan, penyandang disabilitas berat, individu *LGBTQ*, serta kelompok etnis atau ras minoritas.

Untuk menjalankan misinya dalam meningkatkan fungsi sosial, pekerja sosial melakukan intervensi melalui tiga bentuk kegiatan utama antara lain perawatan sosial (*social care*), pengobatan sosial (*social treatment*), dan pengembangan sosial (*social enhancement*).

- (1) Perawatan sosial bertujuan untuk memberikan akses pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perlindungan, serta mendukung kebutuhan psikososial seperti rasa memiliki dan aktualisasi diri. Fokusnya adalah membantu klien agar tetap nyaman dalam kondisi sulit yang tidak

bisa segera diubah. Contohnya termasuk membantu lansia menyesuaikan diri di panti jompo, individu dengan gangguan mental berat, atau mereka yang menghadapi penyakit terminal.

- (2) Pengobatan sosial ditujukan untuk mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang bermasalah dalam individu atau keluarga melalui pendidikan, konseling, atau terapi. Dalam beberapa kasus seperti anak dalam asuhan atau perawatan hospice, pekerja sosial bisa memberikan perawatan sekaligus pengobatan sosial kepada keluarga yang sama.
- (3) Pengembangan sosial difokuskan pada peningkatan kapasitas individu yang sudah berfungsi dengan baik, tanpa harus ada masalah yang teridentifikasi sebelumnya. Contohnya meliputi program rekreasi remaja, klinik bayi sehat, pelatihan pernikahan, atau program pelatihan kerja.

2) Peningkatan Kondisi Sosial

Fokus kedua dari pekerjaan sosial adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan individu. Tujuan ini dilandasi oleh salah satu nilai inti pekerjaan sosial, yaitu komitmen terhadap keadilan sosial. Keadilan sosial merujuk pada prinsip keadilan dan kebenaran moral dalam bagaimana lembaga-lembaga seperti pemerintah, korporasi, dan kelompok berkuasa memperlakukan dan menghargai hak asasi, martabat, dan nilai setiap orang. Prinsip yang berkaitan erat adalah keadilan ekonomi (atau keadilan distributif), yang menekankan pembagian sumber daya ekonomi, peluang, dan beban (seperti pajak, pinjaman, dan kontrak bisnis) secara adil.

Pekerja sosial seringkali menggunakan kebijakan publik, hukum, dan berbagai mekanisme sosial maupun ekonomi untuk memastikan semua orang diperlakukan dengan adil dan memiliki peluang yang layak untuk mencapai keamanan dan kemajuan sosial maupun ekonomi. Konflik politik sering kali berakar dari perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap adil dan sejauh mana tanggung jawab sosial harus diambil untuk mengatasi kebutuhan dan permasalahan manusia. Kebanyakan pekerja sosial meyakini bahwa kebijakan sosial dan ekonomi harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar semua orang—bukan karena prestasi pribadi, melainkan karena setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang melekat. Beberapa hak asasi dasar yang diperjuangkan oleh pekerja sosial antara lain:

- (1) Hak atas makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan layanan sosial dasar untuk bertahan hidup
- (2) Hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penindasan
- (3) Hak untuk bekerja dan menerima upah layak demi hidup bermartabat
- (4) Hak memilih pasangan, berkeluarga, dan hidup bersama keluarga
- (5) Hak atas pendidikan dasar
- (6) Hak atas kepemilikan properti
- (7) Hak atas keselamatan kerja
- (8) Hak beribadah sesuai pilihan, atau tidak beribadah sama sekali
- (9) Hak atas privasi
- (10) Hak untuk bersosialisasi dengan siapa pun yang dipilih
- (11) Hak atas informasi akurat tentang masyarakat dan pemerintah

(12) Hak untuk terlibat dan memengaruhi kebijakan pemerintahan

Namun, pekerja sosial juga menekankan bahwa hak datang bersama tanggung jawab. Misalnya:

- (1) Jika seseorang berhak atas kebutuhan dasar, maka masyarakat bertanggung jawab menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan dasar.
- (2) Jika seseorang berhak atas perlindungan dari kekerasan, maka masyarakat bertanggung jawab menciptakan sistem dan program perlindungan.
- (3) Jika seseorang berhak atas pekerjaan dan penghasilan, maka masyarakat perlu menyediakan peluang kerja dan memastikan upah yang layak.

Ketidakadilan muncul saat orang hanya menuntut haknya sendiri, tetapi melupakan tanggung jawab terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti itu, pekerja sosial sering menjadi advokat bagi mereka yang haknya diabaikan atau dilanggar, serta menjadi suara bagi kelompok rentan dan tertindas.

Berbeda dengan profesi pertolongan lainnya, pekerja sosial lebih sering berupaya mengubah kondisi lingkungan tempat individu hidup dan berinteraksi. Dalam konteks individu dan keluarga, perubahan ini disebut *modifikasi lingkungan*. Contohnya adalah upaya pekerja sosial sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk menyambut teman sekelasnya yang mengalami luka berat akibat kecelakaan, atau membekali ibu asuh dengan pengetahuan agar mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak yang trauma. Ketika bekerja di tingkat organisasi atau komunitas, pekerja sosial bisa saja mencoba memengaruhi para pengambil

keputusan lokal, pelaku usaha, dan lembaga pemerintahan agar lebih peduli dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini bisa mencakup penelitian sosial, perencanaan kebijakan, hingga aksi politik untuk mereformasi hukum, sistem sosial, atau kebijakan publik agar lebih adil dan memperluas peluang serta kualitas hidup masyarakat. Contoh nyata dari upaya tersebut mencakup pengadaan rumah layak dan terjangkau, insentif kerja bagi penyandang disabilitas, revisi undang-undang diskriminatif, hingga pemberdayaan organisasi masyarakat agar lebih aktif menyuarakan aspirasinya.

Dalam beberapa kasus, pekerja sosial juga berupaya melakukan pencegahan terhadap munculnya masalah sosial. Pencegahan ini mencakup tindakan untuk menghapus atau mengurangi kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang bisa memicu masalah. Pencegahan dilakukan dalam tiga tingkatan:

- (1) Pencegahan primer adalah langkah awal agar masalah tidak terjadi.
- (2) Pencegahan sekunder adalah deteksi dini dan penanganan saat masalah baru mulai muncul.
- (3) Pencegahan tersier adalah intervensi terhadap masalah serius agar tidak semakin memburuk atau berdampak lebih luas.

2.1.5.3 Tugas dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Adapun tugas-tugas Pekerja sosial yang dikemukakan oleh Soetarso meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Pekerja sosial menentukan dan membuat hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan guna menyelesaikan tugas kehidupannya.

- 2) Pekerja sosial memberi pengertian, dorongan dan dukungan kepada orang yang mengalami masalah.
- 3) Pekerja sosial memberikan kesempatan kepada orang untuk mengutarakan masalah yang dialaminya.
- 4) Pekerja sosial dapat membantu untuk memilih macam-macam cara untuk mengatasi masalah.
- 5) Pekerja sosial dapat mengonfrontasikan orang dengan realitas yang mereka hadapi.
- 6) Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan untuk mewujudkan gagasan dan aspirasinya.

Dengan maksud lain, bahwa tugas pokok dari Pekerja sosial adalah menciptakan relasi dengan orang yang membutuhkan pelayanan terkait masalah yang dihadapi, Pekerja sosial memberikan layanan konsultasi, konseling dan terapi, menawarkan metode apa yang akan digunakan untuk pemecahan masalah, menghadapkan mengenai realitas yang sedang dihadapannya dan mengajarkan keterampilan untuk semangat hidup dan memunculkan ide keinginannya.

Sedangkan fungsi-fungsi Pekerja sosial menurut Adi Fahrudin yang mengacu pada Dubois dan Miley (1992) meliputi fungsi konsultasi, fungsi pendidikan, dan fungsi manajemen sumber. Fungsi konsultasi adalah menjalin hubungan atas pengalaman dan menjalin relasi untuk memecahkan masalah. Fungsi manajemen sumber adalah mengoordinasikan sumber-sumber pemecahan masalah dan cara pengelola layanan. Dan fungsi terakhir atau ketiga adalah fungsi

pendidikan adalah mendidik serta memperdayakan individu, keluarga maupun kelompok dan komunitas sebagai pencegahan sekaligus pemecahan masalah.

2.1.5.4 Konsep pekerja sosial dalam setting anak

1. Pengertian

Kadusin (Dzikri, 2015), mengatakan bahwa: “Pekerjaan sosial dengan anak adalah sebagai tenaga khusus pekerja sosial professional dan memiliki kemampuan dasar dalam mengatasi masalah diantaranya adalah *body of knowledge, body of values, dan body of skill*”. Tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam bidang ini karena pekerja sosial harus bekerja dengan keragaman berbagai kelompok anak dan keluarga mereka, dari bayi hingga remaja, dengan pengasuh termasuk orang tua tunggal hingga keluarga lengkap serta pengasuh alternatif. Tantangan lain yang dihadapi oleh pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan anak adalah adanya tuntutan untuk dapat bekerja secara kolaboratif dan kemitraan dengan kelompok profesional lainnya, seperti aparat penegak hukum, pendidik, petugas medis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga dengan berbagai organisasi sosial.

Pekerja sosial ketika bekerja dengan anak memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang menjadi kliennya disamping orang tua, dan keluarga mereka. Menurut Laughin (Susilowati, 2020), “Dalam melakukan praktek pekerjaan sosial dengan anak perlu diperhatikan keragaman (*diversity*), nilai dan etika professional, nilai dan etika lembaga dimana kita bekerja, dan nilai etika yang berlaku di masyarakat”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial anak dapat diartikan sebagai salah satu bidang profesi pertolongan pada anak dengan permasalahan yang anak alami dan juga membantu mengatasi persoalan-persoalan anak dan keluarga, sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan keberfungsiansosialnya. Pekerjaan sosial anak ini memiliki tantangan yang cukup sulit dalam penanganan permasalahan anak, dan memberikan pelayanan kesejahteraan anak dalam memenuhi hak-haknya. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak dan melakukan praktek sesuai dengan nilai dan etika pekerja sosial dengan anak.

2. Keterkaitan dengan partisipasi

Penerapan metode intervensi tidak bisa hanya bersifat mekanis atau sekadar mengikuti teori secara lurus. Praktik ini membutuhkan keterampilan, refleksi, analisis kritis, dan pengambilan keputusan yang etis—semuanya harus mencerminkan peran aktif anak-anak dalam prosesnya. Tantangan pasti muncul, terutama saat anak-anak berada dalam situasi berisiko tinggi, baik karena keputusan mereka sendiri maupun akibat tindakan orang lain.

Namun, partisipasi anak tetap penting dan harus menjadi pusat perhatian. Praktisi harus tetap mendorong keterlibatan aktif anak-anak, karena dengan partisipasi yang lebih besar, anak-anak memiliki lebih banyak pilihan, kekuatan, dan peran dalam pengambilan keputusan, seperti yang dijelaskan oleh Wade dan Tovey (dalam Adams, 2011: 179).

2.1.5.5 Konsep pekerja sosial dalam setting kebencanaan

1. Pengertian

Menurut (Heru Sukoco, 2011) mendefinisikan pekerja sosial merupakan salah satu tenaga profesional yang membantu orang mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, baik kesulitan dalam melaksanakan tuntutan peranan sosial, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, maupun dalam memenuhi hak dalam mendapatkan keadilan sosial. Asosiasi pekerja-pekerja sosial (*The National Association of Social Workers*) menyatakan bahwa pekerja sosial adalah lulusan sekolah-sekolah pekerjaan sosial, baik yang bergelar sarjana maupun master yang menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan pelayanan sosial kepada klien baik klien individual, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya.

Praktik pekerja sosial mencakup keterlibatan aktif pekerja sosial tidak hanya dalam respons darurat, tetapi juga dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Praktik ini menuntut pemahaman terhadap kerentanan komunitas seperti infrastruktur yang tidak aman, risiko lingkungan, atau potensi bencana alam dan buatan manusia. Alston (2019) Pekerja sosial harus mampu beroperasi di tingkat makro (kebijakan dan advokasi), meso (organisasi dan komunitas), dan mikro (individu dan keluarga) untuk mengidentifikasi risiko, memperkuat ketahanan, dan merespons dampak bencana secara efektif. Tahapan intervensi meliputi pra-bencana, saat kejadian, dan pasca-bencana, dengan pendekatan yang menyesuaikan setiap lapisan praktik.

Bencana yang terjadi baik bencana alam maupun nonalam dapat mengganggu kesejahteraan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu melaksanakan perannya. (Dede Kuswanda, 2009) profesi pekerjaan sosial sejak lama telah terlibat dalam kegiatan pertolongan bencana, baik melali pemberian bantuan, dan juga perhatian terhadap lingkungan fisik dimana orang tersebut berada.

Selanjutnya, (Tukino, 2014) menjelaskan bahwa :

“Profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Pada saat pra bencana, kontribusi pekerjaan sosial berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana. Pada saat tanggap darurat, pekerjaan sosial membantu pemulihan kondisi fisik dan penanganan psikososial dasar bagi korban bencana. Pada saat pasca bencana, pekerjaan sosial melakukan upaya pemulihan kondisi psikologis korban bencana, khususnya mengatasi trauma dan pemulihan kondisi sosial, serta pengembangan kemandirian korban bencana.”

Secara keseluruhan, pekerjaan sosial dalam setting kebencanaan menekankan pada pendekatan yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat. Pekerja sosial tidak hanya berperan dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam pencegahan dan pemulihan jangka panjang, dengan tujuan membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

Praktik pekerjaan sosial dalam bencana menekankan pada pentingnya interaksi orang dengan lingkungan sosialnya yang disesuaikan dengan status fungsi dan peran sosial baik secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat pada berbagai tahapan penanggulangan bencana. Prinsip pekerja sosial penanggulangan bencana ini dilandasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kedudukan hukum dan kepastian hukum, kebersamaan dan kelesteraian lingkungan

hidup. Seperti pekerja sosial lainnya, Pekerja Sosial bidang Penanggulangan Bencana (PSPB) harus mematuhi semua standarisasi yang sudah ada dan memiliki pelatihan sesuai yang telah ditentukan oleh lembaga berwenang yang dinaungi.

2. Praktik makro pekerjaan sosial di bidang bencana

Praktik kerja sosial tingkat makro berada pada level struktural atau sosial yang luas, dan berfokus pada hal-hal seperti kebijakan publik, manajemen sistem, pendidikan, serta penelitian (Hazeleger, Alston & Hargreaves, 2018). Beberapa akademisi membedakan lebih lanjut antara tingkat makro dan meta, untuk memisahkan tindakan yang berskala global dari tindakan dalam negeri yang berpengaruh pada komunitas lokal.

Menurut Grise-Owens, Miller, dan Owens dalam Alston (2019) praktik pada tingkat meta mencakup aspek-aspek sosial global yang luas dan saling terhubung dengan praktik di tingkat makro, meso, dan mikro. Mereka menyatakan bahwa isu-isu besar seperti ekonomi global, ideologi politik lintas negara, serta budaya konsumerisme yang dominan memiliki pengaruh yang melintasi batas negara, dan dapat melemahkan perhatian terhadap hak asasi manusia serta keadilan sosial dan lingkungan di tingkat lokal.

Di tingkat makro (atau meta), pekerja sosial dituntut untuk memahami bagaimana faktor-faktor besar seperti kebijakan nasional dan global, kerja sama lintas negara, serta ideologi dominan membentuk respons terhadap bencana dan memengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, pekerja sosial tidak hanya perlu mendorong perubahan, tetapi juga, jika memungkinkan, ikut berperan dalam merancang kebijakan kebencanaan melalui advokasi dan keterlibatan aktif.

2.1.5.6 Peran Pekerjaan Sosial Pada Saat Pra Bencana

Peran Pekerja sosial dibidang kesiapsiagaan bencana menurut Alston (2019) pada tingkat makro, pekerja sosial memiliki peran penting dalam memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana melalui berbagai pendekatan struktural. Tugas ini mencakup advokasi kebijakan yang menekankan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pekerja sosial juga terlibat dalam membantu pengembangan kebijakan yang memperhatikan keterkaitan antara manusia dan lingkungannya, serta memberikan umpan balik terhadap kekosongan dalam layanan dan kebijakan publik.

Sebagai bagian dari strategi kesiapsiagaan, pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi risiko bencana di tingkat komunitas, memberikan pelatihan kesiapsiagaan, dan memperkuat kapasitas sosial masyarakat. Ini bisa dilakukan secara fisik—seperti memperkenalkan standar bangunan tahan bencana bagi pemilik rumah—dan secara sosial melalui perencanaan lintas lembaga. Selain itu, pekerja sosial juga membantu membangun modal sosial komunitas, menciptakan register kerentanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap struktur pemerintahan lokal.

Di bidang penelitian dan pendidikan, pekerja sosial dapat mendorong riset lintas disiplin, mengembangkan sistem peringatan dini, serta memperjuangkan pelatihan dan perencanaan kebencanaan yang inklusif dan peka terhadap budaya serta gender. Teori lingkungan dan ekososial juga diintegrasikan ke dalam kurikulum pekerjaan sosial untuk memperkuat keterampilan profesional yang relevan dengan konteks bencana.

Pekerja sosial berkontribusi dalam forum-forum darurat, mengembangkan strategi komunikasi yang mudah diakses (misalnya menggunakan Bahasa Inggris yang sederhana dan diterjemahkan ke bahasa lokal), serta memastikan partisipasi masyarakat yang rentan dalam setiap tahap kesiapsiagaan—misalnya dengan menyediakan tempat aman dan akses untuk anak-anak saat rapat darurat atau kegiatan pendidikan kebencanaan.

Peranan Pekerja Sosial sangat penting dalam pengurangan risiko bencana, terutama dalam hal;

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi mengenai kerawanan, bahaya dan risiko bencana.

Pada situasi tidak terdapat bencana, kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai risiko bencana pada tataran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengatasi risiko bencana yang mungkin terjadi. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah terutama dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sensitif dengan risiko bencana yang mengancam mereka. Namun dengan berbagai pendekatan dan teknik yang dimiliki, pekerja sosial dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar mereka memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan nyawa dan harta benda yang dimiliki.

- 2) Pemetaan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Pemetaan ini amat penting untuk menunjukkan pola umum risiko yang mengancam masyarakat dan kapasitas mereka menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Pemetaan ini juga dapat digunakan untuk menonjolkan kapasitas dan sumber-sumber lokal termasuk keterampilan, persediaan makanan, pilihan tempat tinggal darurat, organisasi sosial dan masyarakat, pemimpin lokal, sikap dan nilai budaya, serta sumber-sumber yang dapat membantu masyarakat mengatasi bencana. Selain itu, pemetaan ini penting untuk membantu dalam merencanakan persiapan yang dapat mengurangi bahaya dalam masyarakat dan dalam mengidentifikasi rencana evakuasi bagi daerah yang berisiko.

- 3) Bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada tingkat lokal.

Pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana yang berfungsi menjalankan sistem pencegahan dan mitigasi, kedaruratan, dan pemulihan.

- 4) Pekerja sosial juga dapat melakukan advokasi kepada para pihak, yang bertujuan agar terjadi perubahan pada tataran kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan peranan-peranan di atas, sesungguhnya pengurangan risiko bencana yang terbaik adalah pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri yang mengetahui risiko-risiko yang akan mereka alami sekiranya bencana terjadi. Dalam konteks ini, peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi terwujudnya suatu mekanisme dan sistem pengurangan risiko

bencana yang dibangun, digerakkan dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri (*community-based risk reduction*).

2.1.5.7 Praktik Pekerjaan Sosial Pada Saat Bencana

1. Pengertian

Pada saat terjadi bencana diperlukan kegiatan tanggap darurat, yakni tindakan yang mendesak dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan kesejahteraan para korban bencana. Pada bencana berskala nasional, masa tanggap darurat memerlukan waktu cukup lama sampai keadaan darurat dinyatakan berakhir.

2. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana dan pengungsi, terutama dalam hal:

- 1) Penanganan terhadap korban bencana yang mengalami trauma dapat ditempuh dengan mendirikan pusat-pusat pelayanan berupa “*Resilience Development Projects*” yang lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial.
- 2) Penanganan terhadap kelompok rentan dengan memberikan perlindungan khusus, agar mereka tidak semakin parah dalam situasi pengungsian.
- 3) Penanganan terhadap masalah pendidikan anak dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah sebagai pengganti atau menunggu perbaikan fasilitas-fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, agar segera dapat digunakan.
- 4) Penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan struktur keluarga yang mengalami kerusakan, hilangnya dukungan sosial, peran sosial yang tidak lagi berfungsi normal, ikatan sosial yang melemah, serta ketidakpastian, dapat

ditempuh dengan melakukan restorasi fungsi-fungsi tersebut. Dalam hal ini melalui fasilitasi dialog-dialog antar dan dengan tokoh-tokoh korban bencana, aspirasi dapat dibulatkan menjadi diskursus yang menentukan arah perbaikan kondisi kehidupan.

Penggunaan multi pendekatan seperti; psikoanalisis, behavioral, kognitif, dan pendekatan lainnya dengan disertai berbagai teknik terpilih antara lain; konseling trauma, terapi bermain, terapi seni dan budaya, pendidikan di sekolah dan pendidikan agama, relaksasi, kelompok bantu diri, dan teknik lainnya, merupakan modalitas dalam praktik pekerjaan sosial. Namun demikian dalam bekerja di lapangan, pekerja sosial tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dengan profesi lainnya seperti; psikolog, sosiolog, antropolog, ahli komunikasi, dokter, dan lain-lain baik dari mulai perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi

2.1.5.8 Praktik Pekerjaan Sosial Pada Saat Pasca Bencana

Pasca bencana adalah kondisi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Pada tahap ini tidak serta merta korban bencana telah dapat hidup dalam situasi normal. Kegiatan pelayanan sosial bagi korban bencana pada pascabencana diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi. Bagi korban bencana yang mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), pelayanan psikososial lanjutan dapat terus dilakukan agar mereka dapat segera pulih dari trauma yang berkepanjangan. Pada tahap rekonstruksi, dilakukan

upaya pembangunan kembali sarana/prasarana serta fasilitas umum yang rusak, agar kehidupan korban bencana dapat dipulihkan kembali.

Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana/pengungsi, terutama dalam hal:

- 1) Pembentukan atau pengembangan forum warga/keluarga pengungsi korban bencana alam.

Forum ini dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi, solidaritas, dan toleransi sosial antar korban bencana maupun masyarakat lokal. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta kerjasama antar kelompok masyarakat korban bencana.

- 2) Pelatihan-pelatihan penanganan masalah.

Merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para korban bencana di daerah pasca bencana dalam mengatasi masalah atau dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Misalnya pelatihan dalam analisis masalah, menyusun perencanaan, koordinasi, evaluasi, dan sebagainya.

- 3) Pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha.

Pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada korban bencana, misalnya pelatihan kewirausahaan, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil, perdagangan, dan sebagainya. Tujuan dari pelatihan keterampilan usaha tersebut adalah meningkatkan kondisi ekonomi korban bencana pada masa pasca bencana.

- 4) Membantu para korban bencana yang tinggal di shelter pengungsian untuk mempersiapkan relokasi ke tempat baru.

Seorang pekerja sosial dapat berperan penting dalam membantu para korban bencana yang tinggal di shelter pengungsian untuk mempersiapkan relokasi ke tempat baru melalui penampilan peranan pekerja sosial sebagai mediator, enabler, dan peran lainnya.

2.1.6 Kajian Pekerja Sosial Komunitas

2.1.6.1 Pengertian

Komunitas didefinisikan dalam beberapa cara - berdasarkan lokasi (misalnya, kota atau desa tertentu), identitas umum (memegang agama tertentu, misalnya) atau kepentingan bersama yang memiliki proyek atau aktivitas tertentu secara bersama). Bencana membuat gagasan komunitas terlihat, sering menyatukan orang berdasarkan semua gagasan tentang komunitas ini. Bencana sering spesifik untuk lokasi yang membuat komunitas terlihat sebagai entitas berbasis tempat dan mungkin spesifik untuk kelompok populasi tertentu, misalnya petani dalam kekeringan sehingga membuat terlihat sebagai aktivitas identitas umum. Pekerja sosial harus mempertimbangkan semua jenis masyarakat dalam upaya mereka untuk membangun ketahanan bencana, memfasilitasi kesiapsiagaan bencana, dan mendukung pemulihan atau pembaruan bencana segera dan jangka panjang. Sangat penting dalam pekerjaan pasca bencana bahwa komunitas yang terkena dampak diidentifikasi

Pekerjaan social komunitas harus didasarkan pada kesadaran, dialog, refleksi dan tindakan karena memanfaatkan berbagai strategi seperti pembangunan, pengorganisasian, perencanaan sosial dan tindakan sosial progresif. Hal ini juga

dianggap memiliki struktur siklus dan bertahap, diidentifikasi sebagai: 1) persiapan, eksplorasi dan keterlibatan; 2) problem berpose, dialog, animasi; 3) pengumpulan data kolektif dan kesadaran; 4) mobilisasi dan struktur bangunan; 5) perencanaan dan pengambilan tindakan; dan 6) evaluasi dan refleksi.

Pekerja komunitas sebagai pekerja sosial terlibat dengan praktik di tingkat individu, kelompok, komunitas dan struktural. Oleh karena itu, kerja komunitas merupakan metode penting dari praktik kerja sosial. Melalui penerapannya, klaim penting dari pekerjaan sosial bahwa itu adalah profesi keadilan sosial yang mempromosikan perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang (IASSW, 2014) akan menjadi kenyataan.

2.1.6.2 Metode Pekerja Sosial Komunitas

Pekerja sosial komunitas dapat mengadaptasi berbagai aspek dari praktik-praktik ini sesuai dengan konteks kerjanya. Salah satu metode praktik komunitas yang semakin menonjol adalah aksi sosial. Kolaborasi, bahkan pembentukan gerakan sosial, menjadi strategi krusial dalam pekerjaan sosial, khususnya bagi para aktivis atau praktisi komunitas progresif (Harms-Smith, 2015; Kamali dan Jönsson, 2019; Moth dan Lavelette, 2019). Gerakan sosial ini berperan dalam memobilisasi dan memfasilitasi aksi sosial sebagai metode praktik komunitas dalam pekerjaan sosial. Mereka berfokus pada isu-isu krusial seperti keadilan sosial dan ekonomi, isu lingkungan, dan penindasan seperti rasisme. Sebagai contoh, Jaringan Aksi Pekerjaan Sosial (SWAN) adalah organisasi gerakan sosial di sektor kesejahteraan. SWAN merupakan aliansi yang menyatukan pekerja sosial, akademisi, mahasiswa, dan individu dengan pengalaman hidup untuk membahas isu-isu kebijakan dan praktik terkait dampak neoliberalisme, ketidakadilan, dan penindasan (Moth dan

Lavelette, 2019). SWAN mengintervensi melalui berbagai tingkatan, seperti kampanye ideologis, agitasi, dan upaya akar rumput (Lavalette dan Moth, 2019).

Tabel 2.1 Metode Pekerja Sosial Komunitas (Rothman, 2001; Weil et al., 2012)

| | Pengembangan Komunitas | Pengorganisasian | Perencanaan Sosial | Aksi Sosial |
|----------------------|--|---|---|---|
| Tujuan Tugas | Meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan kualitas hidup | Mewujudkan perubahan dalam isu sosial, ekonomi, dan politik | Merancang, meningkatkan, dan mereformasi program, layanan, dan institusi | Transformasi sosial, ekonomi, dan politik; keadilan sosial |
| Tujuan Proses | Pemberdayaan, kerja kolektif, penyadaran | Pemberdayaan, kepemimpinan, koalisi, penyadaran | Efisiensi dan efektivitas | Penyadaran, pemberdayaan, perubahan hubungan kekuasaan yang timpang |
| Peserta | Warga dalam komunitas di tingkat lokal | Warga, lingkungan sekitar, komunitas berbasis kepentingan dan identitas | Warga, dewan, perencana sektor publik dan sukarela lokal maupun internasional | Kelompok advokasi dan aktivis, gerakan sosial, kelompok rentan |

2.1.6.3 Proses Pekerja Sosial Komunitas

Proses Pelaksanaan Pekerjaan Sosial di komunitas harus dipandu setiap saat oleh prinsip-prinsip kerja komunitas (Ife, 2013; Ledwith, 2011), serta penekanan terus-menerus pada refleksi dan tindakan atau praksis. Penting untuk diingat bahwa fase tidak tetap atau statis; sebaliknya, mereka adalah cairan, tepuk tangan dan organik. Tahapan proses pekerja social komunitas diantaranya , Tahap pertama berkaitan dengan persiapan, eksplorasi dan keterlibatan Pekerja komu itas harus memastikan bahwa di sini adalah persiapan yang cermat dengan mengeksplorasi isu-isu dan masalah di masyarakat, melakukan pengumpulan data

melalui statistik cerita individu, dan tren politik dan ekonomi. Pekerja harus terlibat dengan individu dan kelompok, dan menegosiasikan masuk dengan kelompok dan lembaga masyarakat yang ada. Kedua, pose masalah, dialog dan animasi adalah pendekatan kolaboratif untuk mengidentifikasi masalah, yang memungkinkan pekerja untuk mengembangkan hubungan dengan individu: ual dan kelompok. Mendefinisikan kebutuhan dalam hal tema generatif memberi energi dan menghidupkan orang mengenai masalah yang mereka hadapi.

Seiring dengan pertumbuhan animasi, pengumpulan data kolektif terjadi untuk meningkatkan tingkat consci- entisation seputar dinamika sosial, politik dan ekonomi yang relevan, dan struktur organisasi. Sejarah, orang, organisasi pola komunikasi, dinamika kekuasaan, struktur kepemimpinan dan lingkungan merupakan bidang pemahaman penting yang akan memungkinkan rencana aksi menjadi tepat.

Proses pengumpulan data dan kesadaran menghasilkan minat yang mengarah pada kebutuhan untuk mobilisasi dan struktur bangunan. Hal ini biasanya terjadi dengan mengadakan pertemuan komunitas dengan pembicara atau bentuk input audio visual lainnya. Pertemuan semacam itu bertujuan untuk memastikan, mendapatkan konsensus tentang tujuan dan sasaran dan kemungkinan jalan ke depan, dan secara demokratis memilih struktur perwakilan untuk membawa proses ke depan. Struktur seperti komite pengarah, tim tugas atau kelompok kerja adalah bentuk struktur komunitas yang membawa proses perencanaan tindakan ke depan.